



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 6/ORT.7-BA/3306/3/2026 tentang Rapat Finalisasi Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana aksi reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan:
1. menjadi pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

- di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
2. melibatkan semua unsur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo untuk berkewajiban melaksanakan rencana aksi secara koordinatif dan bertanggung jawab;
 3. menciptakan birokrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara; dan
 4. meningkatkan kualitas layanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026

**Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo
 Tahun 2026**

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo yang terdiri dari: 1) Tim Pengarah 2) Tim Pelaksana (8 area perubahan) 3) Tim Agen perubahan	Tersedianya Keputusan KPU Kabupaten Purworejo tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2026	√												

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2. Membangun komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Melaksanakan Rapat Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Tersedianya dokumen hasil Rapat Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	√												
		3. Monitoring dan evaluasi rencana kerja dan menindaklanjuti hasil evaluasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti hasil evaluasi	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4. Penyusunan rencana kerja Reformasi Birokrasi	Penetapan rencana kerja reformasi unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	Tersedianya Surat Keputusan tentang rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	√												
		5. Sosialisasi/ internalisasi <i>road map</i> /rencana kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi	Melaksanakan sosialisasi/ internalisasi <i>road map</i> /rencana kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi	Terlaksananya kegiatan sosialisasi/intern alisasi <i>road map</i> /rencana kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		6. Koordinasi atas pengisian kertas kerja sebelum penetapan nilai	Melaksanakan rapat koordinasi atas pengisian kertas kerja	Tersedianya dokumen hasil rapat koordinasi atas pengisian						√							√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	sebelum penetapan nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	kertas kerja sebelum penetapan nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi													
		7. Keterlibatan pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pimpinan unit kerja telah terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Tersedianya dokumen bukti keterlibatan pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2. Tersedianya dokumen	√												

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				pakta integritas pimpinan organisasi													
		8. Menggerakkan unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change/role model</i>	Pembentukan <i>agent of change/role model</i> untuk melakukan perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	Tersedianya Surat Keputusan tentang Reformasi Birokrasi yang memuat pembentukan <i>agent of change/role model</i> untuk melakukan perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	√												
2.	Penguatan Peraturan Perundang-	1. Evaluasi secara berkala Keputusan	Pemetaan Keputusan KPU/Sekretaris	Teridentifikasi seluruh Keputusan							√						√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Undangan/ Deregulasi Kebijakan	KPU/ Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo	KPU Kabupaten Purworejo di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	KPU/ Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo													
		2. Menyempurna kan/ mengubah Keputusan KPU/ Sekretaris KPU Kab. Purworejo yang dipandang tidak relevan, tumpang tindih/ disharmonis dengan	Penyusunan naskah perubahan Keputusan KPU/Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	Telah dilakukan revisi terhadap Keputusan KPU/ Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo yang tidak harmonis							√						√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		peraturan perundang-undang lain															
		3. Merumuskan Keputusan KPU/ Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo baru yang dipandang diperlukan	Penyusunan Keputusan KPU/ Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo baru yang diperlukan sesuai kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	Tersusunnya daftar Keputusan KPU/ Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo													√
		4. Merumuskan kebijakan yang memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama KPU	Penyusunan standar operasional prosedur pelayanan KPU Kabupaten Purworejo	Tersusunnya standar operasional prosedur pelayanan KPU Kabupaten Purworejo						√							

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Kabupaten Purworejo															
3.	Penataan Organisasi/Kelembagaan	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi	1. Membuat Struktur Organisasi KPU Kabupaten Purworejo	Tersedianya Struktur Organisasi untuk mengakomodasi perubahan tatanan kepegawaian di Lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Melakukan pembagian kerja berdasarkan keahlian dan ketrampilan	Tersedianya pohon kinerja untuk mengakomodasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			masing-masing pegawai di mana tugas pegawai didasarkan pada spesialisasi kemampuan yang dimiliki	perubahan tatanan kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo dan analisis jabatan													
			3. Menginformasikan kepada pegawai terkait diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi	Tersedianya Surat Dinas dan Pengumuman perihal diklat pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.	Penataan Tatalaksana	1. Peningkatan tata laksana proses bisnis serta standar operasional prosedur di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	1. Penyusunan standar operasional prosedur sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	Tersedianya standar operasional prosedur sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada proses bisnis di instansi KPU Kabupaten Purworejo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			2. Evaluasi proses bisnis di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	Tersedianya hasil evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang disusun sesuai dengan efektivitas						√						√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi													
		2. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	1. Penguatan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	1. Tersedianya Keputusan KPU Kabupaten Purworejo tentang struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan	√												

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Keputusan KPU Kabupaten Purworejo tentang Daftar Informasi Publik													
				2. Tersedia-nya dokumen permohonan data dan tindak lanjut layanan informasi publik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				3. Tersedia-nya laporan pengelolaan Pejabat Pengelola													√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Informasi dan Dokumentasi													
			2. Melakukan Pemilahan Informasi	Terlaksananya pembaruan data dan informasi publik di laman dan e-PPID	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3. Publikasi kegiatan melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Purworejo	Tersedianya rekapitulasi publikasi melalui laman dan media sosial (Facebook, Instagram, X, TikTok dan Youtube) KPU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Kabupaten Purworejo													
		3. Tata Kelola dan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di KPU Kabupaten Purworejo	1. Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo dengan memanfaatkan aplikasi terintegrasi.	Tersedianya jumlah pemanfaatan aplikasi terintegrasi di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Pemanfaatan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya dokumen data pengakses layanan aplikasi Sistem	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			pelayanan publik, layanan pengaduan publik	Pemerintahan Berbasis Elektronik yang tercantum di laman KPU Kabupaten Purworejo													
			3. Layanan dokumentasi dan informasi hukum	Tersedianya laporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Purworejo						√							√
		4. Penerapan sistem kearsipan yang andal	Pengelolaan arsip secara digital di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	Tersedianya laporan pengelolaan arsip secara digital di lingkungan			√			√			√				√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				KPU Kabupaten Purworejo													
5.	Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia ASN	1. Identifikasi penghitungan jumlah pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	Menghitung jumlah kebutuhan pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	1. Tersedianya analisis jabatan pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	√						√						
				2. Tersedianya data nominatif kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2. Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan	Tersedianya hasil identifikasi kebutuhan pengembangan		√						√					

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			kompetensi kepada seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	kompetensi seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo													
		3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengembangan pegawai berbasis kompetensi di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	Tersedianya sertifikat pendidikan dan pelatihan pengembangan pegawai berbasis kompetensi di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		4. Penetapan kinerja individu di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	Penyusunan penetapan kinerja individu di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	Tersedianya Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai di lingkungan	√												

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Purworejo	KPU Kabupaten Purworejo													
		5. Penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Melaksanakan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	1. Tersedianya dokumen penilaian kinerja berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan KPU Kabupaten Purworejo	√												
				2. Tersedianya dokumen penilaian kinerja individu dan evaluasi kinerja individu	√			√			√			√			
		6. Penilaian kinerja	Melaksanakan	Tersedianya									√				

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu atau pemberian <i>reward and punishment</i>	penilaian kinerja individu untuk dijadikan dasar dalam pengembangan karir individu atau pemberian <i>reward and punishment</i>	dokumen pemberian <i>reward and punishment</i>													
		7. Penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Implementasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Tersedianya rekapitulasi penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		8. Implementasi Standar Kompetensi Jabatan	Mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan pada seluruh jabatan sesuai	Tersedianya dokumen kegiatan implementasi Standar Kompetensi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			kebutuhan KPU Kabupaten Purworejo	Jabatan pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan KPU Kabupaten Purworejo													
		9. Evaluasi jabatan berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan	Melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan	Tersedianya dokumen evaluasi jabatan berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan	√			√			√			√			
6.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	1. Menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026	√												
			2. Menerapkan hasil kinerja dengan memberikan	Tersedianya data pegawai yang menerima <i>reward and</i>						√						√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<i>reward and punishment</i>	<i>punishment</i>													
			3. Menyelenggarakan anggaran yang efektif dan efisien	Tersedianya dokumen program dan kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				Tersedianya dokumen sasaran kinerja yang tercapai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			4. Melakukan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Purworejo	Tersedianya dokumen capaian kinerja KPU Kabupaten Purworejo						√							√
		2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja	Melaporkan data kinerja di Aplikasi e-Lapkin	Tersedianya data kinerja pada Aplikasi e-Lapkin KPU Kabupaten Purworejo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				yang mutakhir														
7.	Penguatan Pengawasan	1. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	1. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	Terbentuknya Satgas Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo		√												
			2. Pembangunan komitmen dan penjabaran atas peraturan gratifikasi	1. Tersedianya dokumen penandatangan Pakta Integritas Penyelenggara Pemilu	√													
				2. Tersedianya dokumen pelaksanaan sosialisasi gratifikasi di lingkungan KPU						√								√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Kabupaten Purworejo													
			3. <i>Public campaign</i> anti gratifikasi	Tersedianya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada <i>stakeholder</i> eksternal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan sistem pengendalian gratifikasi	Tersedianya laporan pengendalian gratifikasi													√
		2. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU	1. Sosialisasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU	Tersedianya dokumen penanganan benturan kepentingan dari	√												

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Kabupaten Purworejo	pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo													
			2. Implementasi penanganan benturan kepentingan bagi anggota dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	Penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan bagi anggota dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	√												
		3. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU	1. Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan	Tersedianya dokumen Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Kabupaten Purworejo	KPU Kabupaten Purworejo	KPU Kabupaten Purworejo													
			2. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	Kartu Kendali dan Data Dukung Sistem Pengendalian Interen Pemerintah tersampaikan kepada pihak terkait melalui laman dan media sosial	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			4. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Tersedianya laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	√							√								
		4. Penanganan Pengaduan Masyarakat	1. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	1. Tersedianya sarana penyampaian pengaduan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
				2. Adanya pejabat yang mengelola pengaduan				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
				3. Terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				4. Terdapat				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				jangka waktu penyelesaian pengaduan													
			2. Pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	Tersedianya data pengaduan masyarakat selesai ditindaklanjuti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3. Monitoring evaluasi, pelaporan dan tindaklanjut pengelolaan atas pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	Tersedianya laporan secara berkala hasil pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan meliputi capaian, hambatan dan rekomendasi penanganan pengaduan masyarakat						√						√	
		5. Whistle Blowing	Whistle Blowing	Whistle blowing						√							

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<i>System</i>	<i>System</i> telah disosialisasikan	<i>system</i> disosialisasikan ke seluruh pegawai													
		6. Pembangunan Zona Integritas	1. Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	Tersedianya Rencana Aksi Zona Integritas yang sudah ditetapkan dan penandatanganan Pakta Integritas	√	√											
			2. Pelaksanaan Rencana Aksi Zona Integritas	Tersedianya laporan pelaksanaan Zona Integritas												√	
			3. Pengisian lembar kerja evaluasi Zona Integritas	Terisinya lembar kerja evaluasi Zona Integritas						√						√	
8.	Peningkatan Kualitas	1. Menerapkan Standar	1. Implementasi standar	Tersedianya layanan informasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Pelayanan Publik	Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	operasional prosedur standar pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo	di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo bagi internal maupun eksternal													
			2. Melakukan sosialisasi Standar Operasional Prosedur Standar Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya sosialisasi Standar Operasional Prosedur Standar Pelayanan Informasi Publik				√									
			3. Melakukan reviu standar pelayanan	Tersedianya hasil reviu dan perbaikan standar						√							√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			informasi	pelayanan informasi													
			4. Memusatkan pelayanan data dan informasi pada satu tempat yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Terpenuhinya permintaan informasi dan data secara cepat dan akurat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2. Mendorong partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1. Penyediaan kotak saran dan aduan pada laman resmi KPU Kabupaten Purworejo	Tersedianya kotak saran dan aduan pada laman KPU Kabupaten Purworejo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Pelaksanaan survei kualitas pelayanan di lingkungan KPU	Tersedianya hasil survei kualitas pelayanan													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Kabupaten Purworejo															
		3. Membuat rumusan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pelayanan	Pembuatan rumusan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi pelayanan	Tersedianya rumusan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pelayanan						√							√	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO